



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2023-2026



DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta 2023-2026 dipergunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan DIY. Dokumen Renstra Dinkes DIY merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY menguraikan langkah dan upaya terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program urusan kesehatan yang terdapat dalam dokumen RPD DIY tahun 2023–2026 ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target kinerja kegiatan di setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi setiap bidang dan unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui dokumen ini, Dinas Kesehatan DIY beserta seluruh perangkatnya menegaskan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2023–2026.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan berjalan dengan baik dengan didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR GAMBAR | 3 |
| DAFTAR TABEL | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.3 Dasar Penyusunan | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 17 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 49 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 53 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan Perangkat Daerah | 53 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dalam RPJPD DIY 2005-2025 | 54 |
| 3.3 Telaah Renstra K/L | 56 |
| 3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 57 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 62 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 63 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 65 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN | 66 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 83 |
| BAB VIII PENUTUP | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY | 16 |
| Gambar 4. 1 Capaian IKPS DIY | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY | 17 |
| Tabel 2. 2 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di DIY Tahun 2021 | 20 |
| Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan di DIY 2021 | 20 |
| Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan | 22 |
| Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta | 46 |
| Tabel 2. 6 Perbandingan Indikator Renstra Dinkes DIY dan Renstra Kemenkes RI | 49 |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan | 64 |
| Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan | 65 |
| Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta | 66 |
| Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 83 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Ini bermakna bahwa kesehatan menjadi hak fundamental setiap warga negara. Maka negara, melalui pembangunan yang dilaksanakan memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan. Bersama segenap komponen Bangsa Indonesia, pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan yang baik adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Menjadi sebuah upaya bersama seluruh potensi bangsa Indonesia, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan dimotori dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Regulasi penyusunan Renstra OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Renstra 2023-2026 ini diperlukan untuk menyikapi masa transisi setelah berakhirnya RPJMD 2017-2022 dan sebelum tersusunnya RPJMD untuk periode berikutnya. Acuan yang digunakan yaitu RPJP DIY 2005-2025, sinkronisasi dengan RPJMN 2020-2024, dan memperhatikan evaluasi capaian RPJMD 2017-2022 serta Agenda Prioritas Gubernur DIY.

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi RPJMN 2020-2024 yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); serta Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Atas dasar hal tersebut, di dalam Renstra 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan DIY yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu juga tidak

bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula gusti*.

Adanya penyebaran wabah COVID-19 yang meluas di seluruh dunia dan ditetapkannya sebagai pandemi berdampak pada segala aspek kehidupan. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu *SARS-CoV-2* yang juga disebut virus Corona. COVID-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejak tanggal 3 Maret 2020, Gubernur DIY telah memberikan arahan melalui Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 untuk menjadi dasar penanganan epidemi di wilayah DIY. Kasus pertama COVID-19 di DIY terjadi pada tanggal 15 Maret 2020, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur DIY No. 65 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang status tanggap darurat di DIY sebagaimana telah diubah terakhir melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 386/KEP/2021 tentang penetapan perpanjangan kesembilan belas status tanggap darurat bencana *corona virus disease 2019* (COVID-19) di DIY yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Gubernur DIY telah menetapkan satuan tugas penanganan melalui Keputusan nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas penanganan COVID-19 di DIY sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/KEP/2021

tentang perubahan atas Keputusan Gubernur DIY nomor 3/KEP/2021 tentang pembentukan Satuan tugas penanganan COVID-19 di DIY. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terdiri dari berbagai klaster dan salah satunya adalah bidang kesehatan.

Selama kurun waktu dua tahun lebih telah dilakukan berbagai upaya penanganan pandemi COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19. Diperkirakan oleh para pakar nantinya COVID-19 tidak lagi bersifat pandemik, melainkan menjadi endemik. Selama kurun waktu 2023-2026 masih diperlukan berbagai upaya untuk penanganan pandemi, percepatan vaksinasi, persiapan penanganan pasca pandemi, serta persiapan penanganan kondisi endemik. Di samping itu, program kegiatan juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan lainnya yang masih menjadi prioritas serta hal-hal yang menjadi amanat Standar Pelayanan Minimal di antaranya: permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya, *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular *degeneratif*, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa, permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan dalam pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dokumen Rencana strategis OPD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan DIY disusun untuk periode tahun 2023-2026. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat dengan mengakomodir berbagai permasalahan kesehatan tersebut di atas. Keseluruhan proses penyusunan Renstra akan menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah

4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal
5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra dapat dipertanggungjawabkan.
6. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan.
7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi OPD Dinas Kesehatan DIY dalam menyusun Rencana Kerja OPD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah DIY dalam kurun waktu empat tahun. Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di DIY serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah.

Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan DIY disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan di DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di DIY.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di DIY saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.

Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan DIY yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan DIY dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antarpelaku pembangunan bidang kesehatan.

1.3 Dasar Penyusunan

Rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 disusun dengan beberapa hal yang mendasari, antara lain:

1. Adanya agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satu agendanya yaitu lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
2. Adanya kebijakan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 dalam mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera,
3. Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 dengan penjabaran visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan,
4. Adanya arahan Gubernur DIY yang berisi perintah agar seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Transisi Provinsi Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Kesehatan DIY diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan DIY mempunyai fungsi sesuai dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
5. Penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
6. Pengelolaan sumber daya kesehatan;
7. Pengembangan upaya kesehatan tradisional;
8. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
10. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan DIY dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;

- b. Kelompok Substansi Program; dan
 - c. Kelompok Substansi Keuangan.
- 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
 - b. Seksi Pencegahan Penyakit
- 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
 - b. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain.
- 5. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - b. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan DIY terdiri atas:

1. RS Jiwa Grhasia

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya untuk:

- a. meningkatkan persentase pasien yang mampu ADL (*activity daily living*);
- b. menurunkan angka pasien cedera karena fiksasi;
- c. meningkatkan waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) menit;
- d. meningkatkan rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun;
- e. meningkatkan waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa kurang dari atau sama dengan 60 (enam puluh) menit;
- f. meningkatkan tingkat penggunaan tempat tidur/ *Bed Occupancy Rate*;
- g. meningkatkan penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan;

- h. meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit;
- i. meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja; dan
- j. meningkatkan kesesuaian inventarisasi barang Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut RS Jiwa Grhasia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian di Rumah Sakit;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

2. RS Paru Respira

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya untuk:

- a. meningkatkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) Tuberculosis;
- b. menurunkan angka kematian pasien lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam;
- c. meningkatkan rata-rata kunjungan rawat jalan per hari;
- d. meningkatkan *Bed Occupancy Rate*; dan
- e. menurunkan *Length of Stay*.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Paru Respira mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;
- b. penyusunan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan; kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya secara paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

3. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- c. pelayanan pemeriksaan klinis, medis, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan dan rujukan laboratorium;
- d. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- f. penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium, konsultasi laboratorium dan penelitian;
- g. pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
- h. pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- i. pelaksanaan pemasaran produk Balai;

- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

4. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan persentase mantan linatih yang meningkatkan kompetensinya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan serta pelatihan keterampilan kesehatan bagi masyarakat;
- c. pengembangan pelatihan bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pengembangan metode pelatihan;
- f. pengembangan kemitraan pelatihan bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

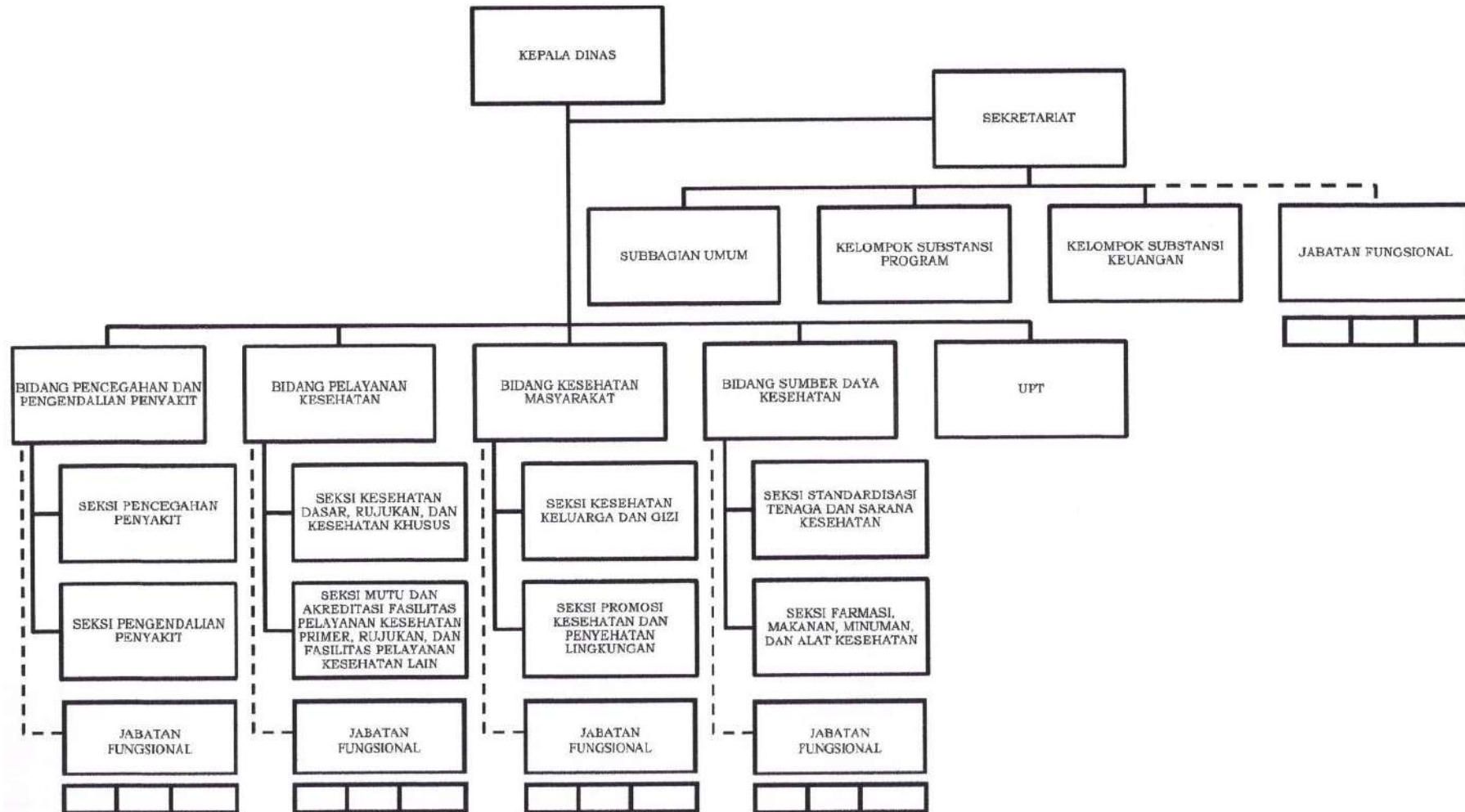
5. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pada Dinas Kesehatan, Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY untuk meningkatkan persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan sosial;
- c. penyelenggaraan manajemen pelayanan jaminan kesehatan;
- d. penyelenggaraan manajemen klaim;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dari hasil updating data yang dilakukan Dinas Kesehatan DIY per 31 Desember 2021, keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Kesehatan (induk) dan UPT adalah 649 orang. Distribusi sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan DIY ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY

| Instansi | SP | S2 | S1 | D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD |
|--|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|
| Dinas Kesehatan | - | 33 | 34 | 3 | 23 | - | 5 | - | 2 |
| RS Jiwa Grhasia | 10 | 29 | 68 | 53 | 115 | - | 18 | - | - |
| RS Paru Respira | 4 | 6 | 55 | 14 | 72 | 1 | 8 | 4 | - |
| Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | - | 4 | 7 | 1 | 5 | - | - | 2 | - |
| Balai Laboratorium Kesehatan | 1 | 5 | 11 | 12 | 18 | - | 3 | - | - |
| Balai Pelatihan Kesehatan | - | 8 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
| Jumlah | 15 | 85 | 180 | 86 | 237 | 1 | 37 | 6 | 2 |

(Sumber: Data Kepegawaian Dinkes DIY, 2021)

Sebagai penunjang semua program dibutuhkan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan DIY. Aset tanah keseluruhan yang dimiliki Dinas Kesehatan DIY per 31 Desember 2021 adalah 31.656 m² dengan rincian Dinas Induk seluas 7.589 m², Bapelkes seluas 11.585 m², Balai Laboratorium Kesehatan seluas 10.623 m² dan Bapel Jamkesos 1.839 m². Untuk RS Jiwa Grhasia DIY menempati tanah kedaulatan “Sultan Ground” dengan status hak pakai yaitu lahan RS seluas 56.390 m² sesuai SK Bupati Sleman No 20 IL/Kep.KDH/ A/2010 yang terletak di Jalan Kaliurang km 17, Pakem Sleman dan makam pasien dan tanah pertanian seluas 15.015 m² di Dusun Kopatan, Kelurahan Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman. Luas bangunan RS Jiwa Grhasia per 31 Desember 2017 adalah 23.636,71 m². Luas tanah RS Paru Respira adalah 1.924 m² dan luas bangunan gedung 2.490 m². Untuk pengembangan pelayanan di RS Paru Respira diperlukan penambahan tanah seluas 10 Ha. Sesuai dengan *master plan* rumah sakit, pada tahap awal diperlukan 1 Ha untuk pembangunan ruang rawat inap serta sarana pendukung dan 9 Ha akan dipergunakan untuk perawatan pasien TB (TB-HIV, TB BTA + dan TB Resisten Obat) terintegrasi.

Aset kendaraan Dinas Kesehatan DIY tahun 2021 berjumlah 50 unit terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 23 buah dan roda dua sebanyak 27 buah. Barang inventaris lain yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja OPD Dinas Kesehatan DIY antara lain

meliputi alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, instalasi, jaringan, dan lainnya keseluruhan. Kendaraan di RS Jiwa Grhasia 14 Kendaraan yang terdiri dari kendaraan operasional sebanyak 6 buah, mobil eselon 2, mobil ambulan 4, mobil jenazah 1 dan kendaraan roda dua ada 2 unit. Kendaraan di RS Paru Respira sebanyak 14 yang terdiri dari kendaraan operasional 2, ambulans 3, mobil jenazah 1 dan kendaraan roda 2 sebanyak 8 buah. Terkait sarana prasarana di RS Paru Respira memiliki 19 jenis sarana prasarana pelayanan sementara jumlah yang dibutuhkan 21 jenis. Masih ada 2 jenis yang dibutuhkan yakni ruang pemulasaran jenazah dan dapur.

Secara umum terkait fasilitas pelayanan kesehatan di DIY relatif cukup banyak baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten/kota. Bahkan jika digabungkan dengan puskesmas pembantu sebagai jaringan pelayannya, telah mampu menjangkau seluruh desa yang ada. Jumlah puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 121 unit, 49 di antaranya memiliki instalasi rawat inap. Sedangkan Puskesmas Pembantu sampai tahun 2020 sebanyak 311 buah. Dari sejumlah total 121 puskesmas tersebut, pada tahun 2020 seluruh puskesmas telah terakreditasi. Seluruh Puskesmas telah dilengkapi dengan jaringan Puskesmas (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa), jejaring puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri) dan memiliki jaringan kemitraan dengan Desa Siaga di seluruh wilayah. Jumlah Puskesmas yang dimiliki DIY sudah memenuhi target nasional (1 Puskesmas/30.000 penduduk).

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di DIY juga relatif telah memadai dengan berbagai jenis pelayannya. Rumah sakit pemerintah tersedia di kelima kabupaten/kota. Perkembangan pelayanan rujukan di sektor swasta sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Fasilitas pelayanan rujukan khusus juga telah berkembang, di antaranya untuk jenis pelayanan bedah, mata, jiwa, dan paru. Pada tahun 2020, di DIY terdapat 80 rumah sakit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 rumah sakit (85%) telah terakreditasi. Jumlah Tempat Tidur (TT) yang tersedia di DIY sudah mencukupi bila dibandingkan standar nasional dan *World Health Organization* (WHO) (1 TT:1000 penduduk). Angka ketersediaan di DIY 1,85 TT/1000 penduduk, sedangkan acuan nasional 1 TT/1000 penduduk. Tetapi permasalahannya adalah persebaran rumah sakit yang berimplikasi jumlah tempat tidur pada kabupaten kota, di mana sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota Yogyakarta

dan kabupaten Sleman. Dampak yang jelas terlihat pada penduduk di Gunungkidul, dimana 1 TT RS melayani 1.424 penduduk, dibandingkan penduduk kota Yogyakarta pada 1 TT RS melayani 242 penduduk.

Berdasarkan kajian indeks risiko bencana dan kejadian kecelakaan lalu lintas di DIY, sistem pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) memegang peranan penting. Pelayanan pra rujukan yang baik membawa dampak pada penurunan angka kematian dan kesakitan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan SPGDT telah dilakukan penyelenggaraan public safety center (PSC) pada pemerintah provinsi maupun 5 kabupaten kota di DIY. Secara kompetensi SDM telah dilakukan gladi secara berkala. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan pendukung lain telah dilengkapi secara bertahap. Untuk sistem informasi, telah dikembangkan aplikasi SPGDT, yang saat ini telah mampu menyediakan data tempat tidur terintegrasi dengan aplikasi RS Online Kementerian Kesehatan, data sebaran fasyankes dan pelaporan pelayanan yang dilaksanakan oleh PSC di provinsi maupun 5 kabupaten kota. Masyarakat di DIY pun telah memiliki peran serta dalam upaya rujukan. Terbukti beberapa ormas dan wilayah memiliki ambulans atau kendaraan perujuk yang memang sangat membantu kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, masih perlu ditata manajemen dan mutu pelayanan pra rujukan yang terintegrasi antara upaya masyarakat, PSC, FKTP dan FKRTL. Masih perlu dilakukan standarisasi pelayanan PSC, standarisasi dan registrasi ambulans/kendaraan yang digunakan untuk merujuk dan peningkatan kapasitas tim baik tim ambulans/ kendaraan perujuk masyarakat, PSC, FKTP dan FKRTL.

Fasilitas pelayanan kesehatan pendukung seperti klinik kesehatan dan apotek juga berkembang baik dengan semakin besarnya peran swasta. Dalam 5 tahun terakhir telah tumbuh berbagai sarana pelayanan pendukung klinik kesehatan dan apotek. Jumlah klinik pada tahun 2020 ada sekitar 314 klinik dan 60 % di antaranya sudah teregistrasi. Upaya peningkatan pelayanan dan mutu klinik dikembangkan dengan mendorong agar semua klinik terregistrasi, mendorong identifikasi ketersediaan atau pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di klinik serta ketenagaannya, dan mendorong pembinaan akreditasi klinik. Pemerintah Daerah DIY sendiri telah memiliki sarana Balai Laboratorium Kesehatan (UPT) yang merupakan rujukan daerah dan regional untuk laboratorium kesehatan.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota juga berkembang. Di tingkat Provinsi terdapat UPTD Jamkesmas yang memberikan pelayanan teknis melalui jaminan pembiayaan kesehatan di tingkat Provinsi, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan UPT Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan). Di Tingkat Kabupaten Kota juga tersedia UPTD Jaminan Kesehatan tersedia di setiap kabupaten/kota. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di DIY per kabupaten/kota 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di DIY Tahun 2021

| Kabupaten/Kota | Jumlah | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|--------|
| | Rumah Sakit | Puskesmas | Klinik | Apotek |
| Kota Yogyakarta | 20 | 18 | 90 | 139 |
| Kab. Sleman | 27 | 25 | 116 | 241 |
| Kab. Bantul | 16 | 27 | 72 | 181 |
| Kab. Kulon Progo | 9 | 21 | 16 | 58 |
| Kab. Gunungkidul | 8 | 30 | 29 | 57 |
| DIY | 80 | 121 | 323 | 676 |

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2021 & Dinas Kesehatan DIY, 2021)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar telah meningkat secara kualitas. Dari 121 Puskesmas yang ada di DIY, pada akhir tahun 2020 telah tercapai 121 puskesmas yang terakreditasi. Puskesmas yang telah dikembangkan menjadi puskesmas rawat inap sebanyak 49 puskesmas dan 72 puskesmas rawat jalan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah DIY untuk dokter umum, perawat sudah memenuhi standar nasional tetapi penyebarannya belum merata. Distribusi tenaga kesehatan terbanyak adalah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gambaran menyeluruh distribusi tenaga kesehatan di DIY berdasarkan kabupaten/kota per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan di DIY 2021

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Kota Yogyakarta | Kab. Sleman | Kab. Bantul | Kab. Kulon Progo | Kab. Gunungkidul | DIY |
|-----|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|
| 1 | Medis | 1112 | 2257 | 219 | 146 | 390 | 4124 |
| 2 | Perawat | 2360 | 3558 | 1489 | 616 | 785 | 8808 |
| 3 | Gizi | 89 | 197 | 101 | 64 | 101 | 552 |
| 4 | Farmasi | 399 | 799 | 223 | 60 | 94 | 1575 |
| 5 | Kesehatan Masyarakat | 34 | 25 | 59 | 23 | 31 | 172 |
| 6 | Bidan | 367 | 723 | 457 | 254 | 317 | 2118 |

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Kota Yogyakarta | Kab. Sleman | Kab. Bantul | Kab. Kulon Progo | Kab. Gunungkidul | DIY |
|-----|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|
| 7 | Kesehatan Lingkungan | 54 | 126 | 75 | 43 | 57 | 355 |
| 8 | Keterampilan Fisik | 92 | 175 | 68 | 3 | 0 | 338 |
| 9 | Keteknisian Medis | 302 | 504 | 178 | 38 | 0 | 1022 |

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2021 & Dinas Kesehatan DIY, 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I | SPM Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | | 100 % | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | n/a | 100 | 100 | n/a | n/a |
| B | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi | | 100 % | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | n/a | 100 | 100 | n/a | n/a |
| II | Standar IKK Non SPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------|------------|------------------------------|------|------|--------|--------|-----------------------------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|------|--------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | | | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.19% | n/a | n/a | n/a | n/a | | n/a | n/a |
| 2 | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | | | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 85% | n/a | n/a | n/a | n/a | | n/a | n/a |
| III | Renstra Dinas Kesehatan DIY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | | | n/a | n/a | n/a | 61.26% | 62.84% | n/a | n/a | n/a | 61.78 % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.85 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 kab/kota | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| a | Sub Kegiatan: Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar (Dinkes) | | | n/a | 30 sarana | - | 30 sarana | 30 sarana | n/a | 30 sarana | - | 30 sarana | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| b | Sub Kegiatan: Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum (RS Grhasia) | | | n/a | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | n/a | 1 paket | 1 paket | 1 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| c | Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit | Tersedianya tahap persiapan pengadaan tanah (RSP Respira) | | | n/a | - | - | 1 paket | 1 paket | n/a | - | - | 1 paket | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| d | Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan, dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya obat-obatan untuk pasien(RS Repira) | | | n/a | 1 paket | - | 3 paket | 2 paket | n/a | 1 paket | - | 3 paket | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| e | Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan (RS Respira) | | | n/a | 28 jenis | 23 jenis | 26 jenis | 18 jenis | n/a | 28 jenis | 23 jenis | 26 jenis | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2 | Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | - BKK pengadaan Alat kesehatan RSUD Saptosari | | | n/a | - | 100% | - | 1 paket | n/a | - | 100% | - | n/a | n/a | - | 100 | - | n/a |
| | | - Hibah PMI | | | n/a | 500,000,000 | 500,000,000 | 1 paket | 1 thn | n/a | 500,000,000 | 500,000,000 | 1 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia | | | n/a | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | n/a | 1 paket | 1 paket | 1 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|------|--------|------|------|-----------------------------|------|--------|---------|------|------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan | | | n/a | - | - | - | 100% | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| b | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Penyelidikan Epidemiologi <24 jam | | | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| c | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | - Anak <1th mendapat imunisasi lengkap | | | n/a | 93% | 96.00% | 95% | 95% | n/a | 93% | 96.71% | 75.60 % | n/a | n/a | 100 | 100.7 | 79.58 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|---------|------|------------------------------|------|-------|--------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/boster | | | n/a | 80.50% | 91% | 90% | 90% | n/a | 80.50% | 94.30% | 57% | n/a | n/a | 100 | 103.6 | 63.33 | n/a |
| | | - Persentase K4 | | | n/a | 74% | 75% | 76% | 77% | n/a | 74% | 75% | 77.53 % | n/a | n/a | 100 | 100 | 102.01 | n/a |
| | | - Persentase KN1 | | | n/a | 86% | 87% | 88% | 89% | n/a | 86% | 87% | 81.29 % | n/a | n/a | 100 | 100 | 92.38 | n/a |
| d | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Persentase Puskesmas PKPR | | | n/a | - | - | 69% | 73% | n/a | - | - | 69.40 % | n/a | n/a | - | - | 100.58 | n/a |
| e | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Persentase Puskesmas Santun Lansia | | | n/a | - | - | 90% | 94% | n/a | - | - | 90.10 % | n/a | n/a | - | - | 100.11 | n/a |
| f | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | - Persentase Penurunan Balita Kurus | | | n/a | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.40% | n/a | 0.10% | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Persentase Penurunan Ibu Hamil | | | n/a | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1% | n/a | 0.25% | 0.25% | 0.25% | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|----------------------|------|------------------------------|------|--------|--------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | KEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | - Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja | | | n/a | - | 193 unit | 197 pos | 197 Pos | n/a | - | 195 unit | 193 pos | n/a | n/a | - | 101.04 | 97.97 | n/a |
| | | - Puskesmas melaksana kan kesehatan olahraga | | | n/a | - | - | 121 puskes mas | 121 Pusk | n/a | - | - | 121 puskes mas | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |
| h | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - Desa/Kelu rahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | | n/a | 60 desa/ keluraha n | 50 desa | 100% | 180 desa/ke l | n/a | 60 desa/ keluraha n | 50 desa | 100% | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkunga n (IKL) | | | n/a | 1182 sekolah | - | 2365 desa | 2365 sekolah | n/a | 1182 sekolah | - | 2991 desa | n/a | n/a | 100 | - | 126.47 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) | | | n/a | 5 kab/kota | 1 dokumen | 5 kab/kota | 5 kab/kota | n/a | 5 kab/kota | 1 dokumen | 5 kab/kota | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - BKK jambanisasi | | | n/a | 2,000,000,000 | - | 100% | 4 kab | n/a | 2,000,000,000 | - | 100% | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| j | Subkegiatan: Pengelolaan Promosi Kesehatan | - Kajian pemanfaatan media dan pembuatan promosi kesehatan | | | n/a | 2 kab/kota | - | 5 kab/kota | 5 kab/kota | n/a | 2 kab/kota | - | 5 kab/kota | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| | | - Kampanye Germas | | | n/a | 5 kab/kota | 3 jenis | 5 kab/kota | 5 kab/kota | n/a | 5 kab/kota | 3 jenis | 5 kab/kota | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat | | | n/a | 1 paket | - | 5 kab/kota | 5 kab/kota | n/a | 1 paket | - | 5 kab/kota | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| | | - Penerbitan majalah mensana | | | n/a | 2 edisi | - | 5 kab/kota | 5 kab/kota | n/a | 2 edisi | - | 5 kab/kota | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|------|------------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| j | Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | - Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya (Balabkes) | | | n/a | 410 jenis | 1 paket | 1 paket | 3 jenis | n/a | 410 jenis | 1 paket | 1 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Penyediaan Peralatan COVID | | | n/a | - | 5 paket | 1 unit | 9 macam | n/a | - | 5 paket | 1 unit | n/a | n/a | - | 100 | 100 | n/a |
| | | - Penyediaan Alat-Alat Laboratorium | | | n/a | 10 jenis | 24 macam | 26 macam | 29 macam | n/a | 10 jenis | 3 macam | 26 macam | n/a | n/a | 100 | 12.5 | 100 | n/a |
| | | - Hibah KPAD | | | n/a | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 1 tahun | n/a | 500,000,000 | 500,000,000 | - | n/a | n/a | 100 | 100 | - | n/a |
| k | Subkegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | - Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga (Bapeljam kesos) | | | n/a | 25850 pasien | 15750 pasien | 100% | 100% | n/a | 35417 pasien | 17935 pasien | 100% | n/a | n/a | 137.01 | 113.87 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|---------|--------|------------|------------|-----------------------------|---------|--------|---------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif (Bapeljam kesos) | | | n/a | | | 10% | 12% | n/a | | | 10% | n/a | n/a | | | 100 | n/a |
| | | - Cakupan Jaminan kesehatan Rehabilitatif (Bapeljam kesos) | | | n/a | | | 20% | 25% | n/a | | | 20% | n/a | n/a | | | 100 | n/a |
| | | - FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan | | | n/a | 35 FKTL | 6 FKTL | 13 RS/FKTL | 10 RS/FKTL | n/a | 35 FKTL | 6 FKTL | 13 FKTL | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| I | Subkegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan | - Kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% | | | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|------|------------------------------|------|------|-------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Sasaran yang mendapat imunisasi COVID-19 | | | n/a | - | - | 80% | 80% | n/a | - | - | 86% | n/a | n/a | - | - | 107.5 | n/a |
| m | Subkegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | - Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar | | | n/a | 35 puskesmas dan RS | 3 fasyankes | 40 fasyankes | 45 Fasyankes | n/a | 35 puskesmas dan RS | 3 fasyankes | 40 fasyankes | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan | | | n/a | 20 klinik pratama | 30 klinik | 30 klinik | 40 Klinik | n/a | 20 klinik pratama | 30 klinik | 30 klinik | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar | | | n/a | 80 puskesmas | 100 puskesmas | 121 puskesmas | 121 Pusk | n/a | 80 puskesmas | 100 puskesmas | 121 puskesmas | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan | | | n/a | 40 RS | 60 RS | 80 RS | 80 RS | n/a | 40 RS | 60 RS | 80 RS | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| n | Subkegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat (SPGDT) | Pengembangan pelayanan SPGDT | | | n/a | 40 faskes | 30 faskes | 1 paket | 100% | n/a | 40 faskes | 30 faskes | 1 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| o | Subkegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit | - Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing & visum et repertum (RS Grhasia) | | | n/a | 1 paket | - | - | 1 paket | n/a | 1 paket | - | - | n/a | n/a | 100 | - | - | n/a |
| | | - Pengadaan perlengkapan ruang isolasi (RS Grhasia) | | | n/a | 1 paket | - | - | 1 paket | n/a | 1 paket | - | - | n/a | n/a | 100 | - | - | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|-------------|------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan (RS Grhasia) | | | n/a | - | - | - | 1 paket | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| | | - Pengadaan hardware SIMRS (RS Grhasia) | | | n/a | - | - | 1 paket | 1 paket | n/a | - | - | 1 paket | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |
| | | - Tersedianya BMHP dan reagen (RS Respira) | | | n/a | 2 paket | 4 jenis | 2 paket | 2 paket | n/a | 2 paket | 4 jenis | 2 paket | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Tersedianya alat bengkel (RS Respira) | | | n/a | - | - | - | 3 jenis | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| 3 | Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|------|------------------------------|------|--------|--------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| a | Subkegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | - Buku Data Kesehatan Tahun 2021 | | | n/a | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dok | n/a | - | 1 dokumen | 1 dokumen | n/a | n/a | - | 100 | 100 | n/a |
| | | - Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 | | | n/a | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dok | n/a | - | 1 dokumen | 1 dokumen | n/a | n/a | - | 100 | 100 | n/a |
| | | - Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap | | | n/a | 200 materi | 180 materi | 180 materi | 180 materi | n/a | 200 materi | 183 materi | 197 materi | n/a | n/a | 100 | 101.67 | 109.44 | n/a |
| b | Subkegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan | | | n/a | - | - | 6 sistem informasi | 6 sistem informasi | n/a | - | - | 6 sistem informasi | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 4 | Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a | Subkegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | - Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu | | | n/a | 121 puskesmas | - | 121 puskesmas | 121 Pusk | n/a | 121 puskesmas | - | 121 puskesmas | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| | | - Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu | | | n/a | 10 klinik | - | 3 klinik | 30 Klinik | n/a | 10 klinik | - | 3 klinik | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| | | - Rumah Sakit Yang mendapatkan pembinaan mutu | | | n/a | 40 RS | 60 RS | 78 RS | 80 RS | n/a | 40 RS | 60 RS | 78 RS | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------|------------|------------------------------|----------|------|----------------|-------|-----------------------------|----------|------|----------------|------|------------------------------|------|------|--------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu | | | n/a | 1 labkes | - | 5 laboratorium | 5 Lab | n/a | 1 labkes | - | 5 laboratorium | n/a | n/a | 100 | - | 100 | n/a |
| B | Program: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase mantan linatih yang meningkatkan kompetensinya | | | n/a | n/a | n/a | 66% | 68% | n/a | n/a | n/a | 84.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 128.03 | n/a |
| 1 | Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat | - Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Daerah Provinsi | - Jumlah Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 Keg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a | Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana | | | n/a | 236 FKTP & FKTL | 121 FKTP | 40 FKTP dan FKTL | 12 bulan | n/a | 236 FKTP & FKTL | 121 FKTP | 40 FKTP dan FKTL | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| b | Subkegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia | - Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan yang Mendukung Operasional Bapelkes (Bapelkes) | | | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Audit Mutu Internal Bapelkes | | | n/a | 2 dokumen | 2 laporan | 1 laporan | 2 laporan | n/a | 2 dokumen | 2 laporan | 1 laporan | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Kurikulum Pelatihan yang Dibuat (Bapelkes) | | | n/a | 1 dokumen | 1 kurikulum | 1 kurikulum | 1 kurikulum | n/a | 1 dokumen | 1 kurikulum | 1 kurikulum | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat (Bapelkes) | | | n/a | - | - | - | 1 laporan | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| | | - Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat (Bapelkes) | | | n/a | - | - | - | 1 laporan | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| | | - Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) yang Dilakukan (Bapelkes) | | | n/a | 3 dokumen | 4 laporan | 5 laporan | 6 laporan | n/a | 3 dokumen | 4 laporan | 5 laporan | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|------|------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan (Bapelkes) | | | n/a | 55 kegiatan | 15 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | n/a | 64 kegiatan | 15 kegiatan | 1 kegiatan | n/a | n/a | 116.36 | 100 | 100 | n/a |
| | | - Pengembangan Sistem Pembelajaran (Bapelkes) | | | n/a | 1 visualisasi | - | - | 1 sistem | n/a | 1 visualisasi | - | - | n/a | n/a | 100 | - | - | n/a |
| C | Program: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase kefarmasian, perbekes, dan makanan sesuai standar | | | n/a | n/a | n/a | 81.07% | 86.48% | n/a | n/a | n/a | 81.07 % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------------------------|------|------|--------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Kegiatan: Pengendalian dan Penyawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatk an pembinaan sesuai dengan standar | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 35 sarana | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a | Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisiona l yang mendapatk an pembinaan | | | n/a | - | - | 30 sarana | 35 sarana | n/a | - | - | 33 sarana | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|------|------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| D | Program: PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase peningkat an potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 | Kegiatan: Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Terseleng garanya pengemba ngan pelayanan kesehatan tradisional | | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a | Sub Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | - Kajian Pengemba ngan Kesehatan Tradisional | | | n/a | - | - | 1 dokum en | 2 dok | n/a | - | - | 1 dokum en | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |
| | | - Penyehat Tradisiona l Mendapatk an Pembinaan Legalitas Pelayanan | | | n/a | 3 jenis hatra | 180 penyeha t tradision al | 1 dokum en | 1 dok | n/a | 3 jenis hatra | 0 | 1 dokum en | n/a | n/a | 100 | 0 | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------------------------|------|------|-----------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Peningkatan Kapasitas Hatra di area wisata | | | n/a | - | - | 1 dokumen | 1 dok | n/a | - | - | 1 dokumen | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |
| | | - Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional dan konsultasi teknis kesehatan tradisional | | | n/a | - | - | - | 1 dok | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |
| | | - Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Saintifikasi Jamu) | | | n/a | - | - | 30 orang | 1 dok | n/a | - | - | 30 orang | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |
| | | - Film Kesehatan Tradisional (Ramuan, Refleksi dan Akupunktur) | | | n/a | - | - | 1 video | 1 dok | n/a | - | - | 1 video | n/a | n/a | - | - | 100 | n/a |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SP M | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|------|------|-------|-----------------------------|-----------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | - Pameran Jamu | | | n/a | 2 dokume n | - | - | 1 dok | n/a | 2 dokumen | - | - | n/a | n/a | 100 | - | - | n/a |
| | | - Lomba Film, vlog dan liputan kestrad | | | n/a | - | - | - | 1 dok | n/a | - | - | - | n/a | n/a | - | - | - | n/a |

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

| Uraian***) | | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 4 | Pendapatan Daerah | n/a | n/a | n/a | 37,849,903,700 | 7,956,000,000 | n/a | n/a | n/a | 38,741,796,742.22 | n/a | | |

| Uraian***) | | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | n/a | n/a | n/a | 37,849,903,700 | 7,956,000,000 | n/a | n/a | n/a | 38,741,796,742.22 | n/a | | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | n/a | n/a | n/a | 37,849,903,700 | 7,956,000,000 | n/a | n/a | n/a | 38,741,796,742.22 | n/a | | |
| 5 | Belanja Daerah | n/a | n/a | n/a | 301,964,086,323 | 214,829,584,336 | n/a | n/a | n/a | 235,528,032,420 | n/a | | |
| 5.1 | Belanja Operasi | n/a | n/a | n/a | 279,578,050,783 | 186,810,205,145 | n/a | n/a | n/a | 215,920,301,857 | n/a | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | n/a | n/a | n/a | 101,375,790,951 | 35,272,040,961 | n/a | n/a | n/a | 93,184,380,617 | n/a | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | n/a | n/a | n/a | 176,424,871,832 | 150,491,764,184 | n/a | n/a | n/a | 121,556,476,124 | n/a | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | n/a | n/a | n/a | 1,777,388,000 | 1,046,400,000 | n/a | n/a | n/a | 1,179,445,116 | n/a | | |
| 5.2 | Belanja Modal | n/a | n/a | n/a | 22,386,035,540 | 28,019,379,191 | n/a | n/a | n/a | 19,607,730,563 | n/a | | |

| Uraian***) | | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | 6 (2022) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | n/a | n/a | n/a | 15,114,821,740 | 4,396,160,600 | n/a | n/a | n/a | 12,864,728,314 | n/a | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | n/a | n/a | n/a | 7,222,213,800 | 23,401,359,000 | n/a | n/a | n/a | 5,799,492,249 | n/a | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | n/a | n/a | n/a | - | 27,000,000 | n/a | n/a | n/a | - | n/a | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | n/a | n/a | n/a | 49,000,000 | 194,859,591 | n/a | n/a | n/a | 943,510,000 | n/a | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2. 6 Perbandingan Indikator Renstra Dinkes DIY dan Renstra Kemenkes RI

| No. | Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Target Renstra Kemenkes 2020-2024 | Program Dinas Kesehatan DIY 2021 | Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021 | Indikator 2021 | Target 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat | Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10% | 10% | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Persentase bumil KEK | 0,25% | 0,25% | |
| 2 | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% | 95% | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 1) Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan/booster 2) Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap 3) Persentase KN1 4) Persentase K4 | 1) 90% 2) 95% 3) 88% 4) 76% | 1) 57% 2) 75.6% 3) 81.29% 4) 77.53% | - Persalinan di fasyankes tahun 2017: 99,87% - Persentase stunting di DIY tahun 2020: 11,08% - Persentase bayi <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif tahun 2020: 81,12% |
| 3 | | Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota | 514 kab/kota | | | | | | |
| 4 | | Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14% | 14% | | | | | | |
| 5 | | Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60% | 60% | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Target Renstra Kemenkes 2020-2024 | Program Dinas Kesehatan DIY 2021 | Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021 | Indikator 2021 | Target 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|-----|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|---------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 6 | | Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100% | 100% | | | | | | |
| 7 | | Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50% | 50% | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kampanye GERMAS | 5 kab/kota | 5 kab/kota | |
| 8 | | 100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514) | 514 kab/kota | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) | 5 kab/kota | 5 kab/kota | |
| 9 | | Kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota | 420 kab/kota | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan | Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas | 100% | | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan | 121 puskesmas | 121 puskesmas | Setiap kecamatan di DIY telah memiliki minimal 1 puskesmas |
| 11 | | Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1000 sebesar 100% | 100% | | | | | | TT : 1.000 penduduk di DIY tahun 2020 1) Kulon Progo: 1,31 2) Bantul: 1,24 3) Gunungkidul: 0,70 4) Sleman: 2,59 5) Kota Yogyakarta 4,15 |

| No. | Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Target Renstra Kemenkes 2020-2024 | Program Dinas Kesehatan DIY 2021 | Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021 | Indikator 2021 | Target 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 12 | | Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100% | 100% | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu | 121 puskesmas | 121 puskesmas | |
| 13 | | Persentase RS terakreditasi sebesar 100% | 100% | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | RS yang mendapatkan pembinaan mutu | 78 RS | 78 RS | Status akreditasi RS di DIY tahun 2020: sebanyak 68 RS telah terakreditasi dan 12 RS belum terakreditasi |
| 14 | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain | 500 fasyankes | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 1) Laboratorium yang mendapatkan Pembinaan Mutu 2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu | 1) 5 laboratorium 2) 3 klinik | 1) 5 laboratorium 2) 3 klinik | |
| 15 | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024 | 190 per 100.000 penduduk | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1) Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 2) Kab/Kota yang melakukan posbindu standar dan PANDU PTM 3) Klinik yang | 1) 80% 2) 5 kab/kota 3) 100% 4) 40 desa 5) 92.38% 6) 5 kab/kota 7) 80% 8) 5 kab/kota | 1) 86% 2) 5 kab/kota 3) 100% 4) 40 desa 5) 92.38% 6) 5 kab/kota 7) 100% 8) 5 kab/kota | - Kasus TBC Paru BTA (+) tahun 2020: 2.721 - Kasus baru HIV tahun 2020: 363 - Kasus positif malaria tahun 2020: 8 - Anak kurang dari 1 tahun mendapat |
| 16 | | Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024 | 0,18% | | | | | | |
| 17 | | Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota | 405 | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes RI 2020-2024 | Target Renstra Kemenkes 2020-2024 | Program Dinas Kesehatan DIY 2021 | Sub Kegiatan Dinas Kesehatan DIY 2021 | Indikator 2021 | Target 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|-----|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 18 | | Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95% | 95% | | | melaksanakan strategi DOTS 4) Desa terlatih pengamatan jentik nyamuk 5) % fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia 6) Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa 7) % DPS yang tersosialisasikan ISCT 8) kab/kota yang melakukan deteksi dini kanker 9) fasilitas kesehatan yang melakukan strategi DOTS 10) Kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria | 9) 100% 10) 5 kab/kota | 9) 100% 10) 5 kab/kota | imunisasi lengkap tahun 2021: 75.6% |
| 19 | | Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota | 514 kab/kota | | | | | | |
| 20 | | Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86% | 86% | | | | | | |

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kualitas kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Stunting adalah tantangan utama di DIY saat ini. Telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas. Upaya selama ini yang telah dilakukan antara lain imunisasi bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan bayi balita. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan dan memberi dampak perbaikan namun demikian masih bersifat dinamis.

Penyakit tidak menular di DIY semakin mendominasi dengan risiko kematian yang semakin tinggi. Faktor-faktor yang menjadi pemungkin dalam hal ini adalah kebiasaan merokok, olahraga, pola makan yang sehat, dan disiplin pengobatan. Hasil Riskesdas Kemenkes RI, menyatakan bahwa DIY memiliki prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa dan oleh karenanya tatakelola perawatan dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan di DIY.

Pengendalian penyakit menular di DIY telah semakin membaik namun beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan yaitu Tuberculosis, DBD, HIV disamping pandemic COVID-19. Penanganan COVID-19 menunjukkan perbaikan sementara untuk DBD masih fluktuatif dan saat ini pengendalian DBD telah mengalami kemajuan baru dengan penerapan bio-ekoteknologi. Permasalahan TBC masih menghadapi tantangan dalam upaya pengobatan dan perilaku pencegahan. Terkait dengan penyehatan lingkungan, provinsi DIY memiliki catatan capaian yang cukup baik dan menjadi pendukung penting dalam upaya pencapaian SDG's di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah dengan keragaman potensi bencana dan kejadian luar biasa penyakit. Pengalaman bertahun-tahun telah memberikan referensi berharga termasuk dalam hal ini pandemi COVID-19. Tantangan di DIY saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang terlindungi dari krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa, sebagaimana saat ini dialami dalam pandemic COVID-19.

Bapak Gubernur DIY telah pengarahannya bahwa pembangunan di DIY adalah filosofi pembangunan berbasis budaya dan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran kondisi kesehatan antar wilayah di DIY saat ini memperlihatkan bahwa wilayah selatan (Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo) memiliki kondisi capaian kesehatan

yang masih tertinggal dengan wilayah Kota dan Sleman. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kesehatan di DIY saat ini adalah upaya yang berkaitan dengan pengurangan disparitas wilayah tersebut.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dalam RPJPD DIY 2005-2025

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi.

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi, dan aspek-aspek potensial, serta perkembangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, maka ditetapkan visi pembangunan DIY yang akan dicapai dalam 2005 sampai dengan 2025 adalah: **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Salah satu definisi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat empat sasaran pembangunan jangka panjang daerah, yaitu:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025;
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025;
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025; dan
4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, yang di antaranya ditandai oleh
 - a. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja; dan
 - b. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penekanan pada lima tahun keempat (2020-2025) adalah **“penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”**.

Fokus pelaksanaan pembangunan tersebut, diinisiasi melalui misi yang meliputi:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam tahap IV ini, arah kebijakan dalam bidang kesehatan yaitu menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan. Prioritas pada tahap IV yaitu:
 - a. Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;

- b. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik; dan
- c. Peningkatan wawasan masyarakat yang responsif terhadap penyakit menular.

3.3 Telaah Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 misi berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden tahun 2020-2024 tersebut sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
2. Menurunkan angka stunting pada balita;
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

Di samping itu, terdapat 5 prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
Memangkas hambatan investasi

4. Reformasi Birokrasi

- a. Kecepatan melayani dan memberi izin
- b. Menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman
- c. Adaptif produktif, inovatif, dan kompetitif

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya prioritas kerja Presiden tersebut di atas, terutama dalam pembangunan SDM. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu

terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012

tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh

daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tahap berikutnya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dari proses pra-pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Persoalan kemiskinan ini memiliki implikasi yang luas dan kompleks pada Kesehatan, di antaranya:

a. Gizi

Tingginya angka kemiskinan berpengaruh kepada status gizi. Mereka yang berada pada garis kemiskinan merupakan orang-orang yang berada pada situasi rawan pangan. Angka ketersediaan energi dan protein di DIY sudah melebihi standar Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Tahun 2012, yaitu angka ketersediaan energi sebesar 3.735 kkal/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 2.400 kkal/kap/hari, sedangkan angka ketersediaan protein sebesar 108,04 gram/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 63 gram/kap/hari. Meski demikian, tingkat konsumsi energi penduduk DIY belum sesuai standar, yaitu sebesar 2.146,60 kkal/kap/hari (tahun 2020) dengan standar 2.150 kkal/kap/hari sedangkan angka konsumsi protein sudah melebihi standar, yaitu 69 gram/kap/hari dengan standar 57 gram/kap/hari.

Adapun gambaran status gizi di DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Prevalensi Balita Stunting tahun 2020 sebesar 11,08%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 10,69%.
- 2) Balita Kurang Energi Protein (KEP) tahun 2020 sebesar 8,28%, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,35%.
- 3) Angka BBLR tahun 2020 sebesar 6,1%, naik dibanding tahun 2019 (5,7%).
- 4) Cakupan Asi Eksklusif tahun 2020 sebesar 81.5%, naik dibanding tahun 2019 sebesar 77,5%.

5) Cakupan ibu hamil anemia tahun 2020 sebesar 15.84%, naik dibanding tahun 2019 (15,69%).

6) Ibu hamil KEK tahun 2020 sebesar 12.96%, naik dibanding tahun 2019 (12,68%)

b. Pembiayaan Kesehatan

Angka kemiskinan yang tinggi menyebabkan perlunya upaya pembiayaan kesehatan utamanya pada masyarakat miskin. Tahun 2020, cakupan penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.552.318 orang dan 458.923 orang dari PBI APBD dengan total jumlah PBI 2.011.241 orang, sedangkan peserta Non PBI sebanyak 1.371.808 orang sehingga total masyarakat yang telah memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 3.383.049 orang (92,2%). Pembiayaan tersebut masih belum menjamin semua masyarakat miskin di DIY. Pemerintah DIY melalui Bapel Jamkesos memberikan Bantuan Jaminan Kesehatan pada masyarakat miskin non jaminan, *marginal* dan disabilitas. Pelayanan jaminan kesehatan kuratif, preventif, dan rehabilitatif yang telah dilakukan Bapel Jamkesos hingga akhir tahun 2020 adalah sebanyak 17.935 pasien.

Program Pembiayaan Kesehatan di DIY telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman di tingkat Pusat, diantaranya untuk Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin. Berbagai upaya program pembiayaan Kesehatan telah dilakukan dan dimonitor terhadap implementasinya di lapangan khususnya terhadap cakupan kepesertaan serta mutu pelayanan Kesehatan masyarakat.

c. Pelayanan Kesehatan Terbatas di Kawasan Selatan

Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Selatan, menjadi dasar untuk pengembangan layanan kesehatan di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pengembangan RS Paru Respira menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah selatan.

d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada Tempat-Tempat Umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan. Hasil Inspeksi pada sarana pendidikan, 93,30% memenuhi syarat, Sekolah Dasar (SD) 93,80% memenuhi syarat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 91,5% memenuhi syarat, dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) 93,20% memenuhi syarat. Untuk sarana kesehatan, semua Puskesmas memenuhi syarat, RS 100% memenuhi syarat, hotel bintang 100% memenuhi syarat dan non bintang 84,4% yang memenuhi syarat. Sedangkan pada tempat-tempat umum yang lain, 90,11% sudah memenuhi syarat kesehatan. Pada inspeksi kesehatan lingkungan di tempat pengelolaan makan, 66,90% memenuhi syarat hygiene sanitasi. Penduduk dengan sanitasi layak dengan memiliki jamban sehat sudah mencapai 93,28% dan akses sanitasi 100%, serta akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas mencapai 94,30%.

e. *Multiple Burden of Disease*

Multiple Burden of Disease yaitu penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, *new emerging disease*, seperti SARS, Flu Burung, dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease*), seperti ZIKA. HIV/AIDS, Tuberkulosis, Demam Berdarah menjadi masalah prioritas penyakit infeksi. DIY sebagai kota wisata dan pendidikan beresiko untuk penularan HIV. Didukung dengan peredaran narkoba yang kian marak. Penemuan kasus baru HIV pada tahun 2020 adalah 363 kasus dan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus.

f. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis masih menjadi masalah karena masih banyak penderita TB yang belum ditemukan, sehingga resiko penularan di masyarakat masih tinggi. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan angka penemuan kasus TB semakin menurun. Penurunan penemuan kasus TB secara nasional adalah sebanyak 25,3% dengan kondisi penurunan di setiap provinsi bervariasi antara 8,4%-48,4%, sedangkan di DIY sendiri mengalami penurunan sebesar 12,7% yaitu 44% pada tahun 2019 menjadi 31,4% per 27 Februari 2021. Angka keberhasilan pengobatan TB secara nasional juga menurun sebesar 1%, namun di DIY angka keberhasilan pengobatan meningkat sebesar 2,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pasien TB di DIY yang sudah ditemukan tetap bisa menjalani pengobatan dengan baik sampai selesai dan tidak banyak pasien yang mengalami *drop out* (DO) akibat pandemi COVID-19.

g. Demam Berdarah (DBD)

Jumlah kasus demam berdarah masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.623 orang. Jumlah kasus tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul (1.222), diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul (979), Kabupaten Sleman (810), Kabupaten Kulon Progo (316), sedangkan jumlah kasus terendah di Kota Yogyakarta (296). Jumlah total kematian akibat DBD sebanyak 13 orang dengan jumlah kematian terbanyak di Kabupaten Bantul (4 orang) dan Kabupaten Gunung Kidul (4 Orang).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kesehatan DIY beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melakukan koordinasi internal untuk menetapkan isu-isu strategis Dinkes DIY. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penetapan isu-isu strategis adalah RPJP DIY 2005-2025, RPJMN 2020-2024, evaluasi capaian RPJMD 2017-2022, dan Agenda Prioritas Gubernur DIY. Berikut ini adalah isu-isu pokok dan/atau isu-isu strategis yang menjadi masalah prioritas:

1. Upaya *recovery* pasca Covid-19 dan percepatan penyelesaian target vaksinasi COVID-19,
2. Permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya,
3. Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa,
4. Permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak, dan
5. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting di antaranya berdampak terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan sistem kekebalan tubuh. Percepatan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah di bidang kesehatan. Berdasarkan data Riskesdas dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menurun dari tahun ke tahun, yaitu 27.6 (2007), 27.3 (2013), 21.46 (2018), 21 (2019), dan 17.3 (2021).

Untuk mengetahui seberapa baik penanganan stunting di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun analisis kinerja penurunan stunting melalui Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) yang diinisiasi sejak 2018. IKPS terdiri dari 12 indikator yang dikelompokkan dalam 6 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Kesehatan

- a. imunisasi,
- b. penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan, dan
- c. keluarga berencana (KB) modern.

2. Dimensi Gizi

- a. ASI eksklusif, dan
- b. makanan pendamping (MP) ASI.

3. Dimensi Perumahan

- a. air minum layak, dan
- b. sanitasi layak.

4. Dimensi Pangan

- a. mengalami kerawanan pangan, dan
- b. ketidakcukupan konsumsi pangan.

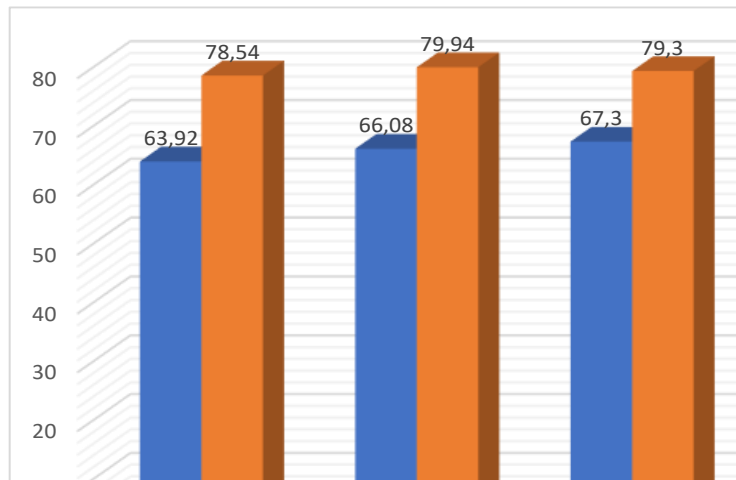
5. Dimensi Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Dimensi Perlindungan Sosial

- a. pemanfaatan jaminan Kesehatan, dan
- b. penerima KPS/KKS.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki capaian IKPS tertinggi pada tahun 2018-2020. Gambar 4.1 berikut menunjukkan capaian IKPS DIY tahun 2018-2020.



Gambar 4. 1 Capaian IKPS DIY

Oleh karena itu, IKPS ini perlu dituangkan menjadi program dan kegiatan yang lebih implementatif dengan menuangkan prevalensi stunting sebagai tujuan Renstra Dinas Kesehatan DIY 4 tahun ke depan. Berikut rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|-----|---|---------------------|--|-----|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Stunting | 16 | 14 | 13.7 | 13.3 |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|-----|--|---|--|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Terwujudnya keluarga sehat | Indeks Keluarga Sehat | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| 2. | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah | Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A | A | A | A |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam empat tahun mendatang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Terwujudnya Keluarga Sehat 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Pemerintah Daerah | 1. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana dan KLB dengan penekanan <i>pre-hospital emergency</i> | Optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan meningkatkan kemitraan lintas sektor |
| | | 2. Fokus pada penguatan layanan kesehatan <i>Primary Health Care</i> , RS, dan pengembangan RS Respira menjadi RS Unggulan Paru di wilayah selatan DIY | Optimalisasi mutu layanan dan mengembangkan sarana upaya pelayanan kesehatan khususnya di wilayah selatan DIY |
| | | 3. Fokus pada intervensi penurunan stunting | Optimalisasi konvergensi program untuk pencapaian penurunan stunting |
| | | 4. Fokus pada <i>bridging system/integrasi</i> sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan | Optimalisasi implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi dan <i>real time</i> |
| | | 5. Mendukung budaya menjadi <i>mainstream</i> pembangunan dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional | Optimalisasi pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas |
| | | 6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan masyarakat | Optimalisasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan |

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|--------------|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM | 93,1% | 161.799.983.502 | 93,1% | 305.039.602.810 | 93,6% | 174.672.934.450 | 94,1% | 381.925.572.108 | 94,6% | 314.040.315.600 | 94,6% | 1.175.678.424.968 |
| 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | n/a | 24.069.566.992 | 6 dokumen | 209.882.679.310 | 4 dokumen | 82.642.288.750 | 4 dokumen | 281.688.423.408 | 4 dokumen | 230.559.443.383 | 4 dokumen | 804.772.834.851 |
| | | Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya | n/a | | 5 paket | | 5 paket | | 5 paket | | 5 paket | | 5 paket | |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---------------------|---|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| | | Pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. | n/a | | 31 unit | | 35 unit | | 902 unit | | 501 unit | | 501 unit | |
| 1.02.02.1.0 1.02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | n/a | 4.012.168.000 | 2 unit | 6.336.275.110 | 4 unit | 52.692.677.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 unit | 59.028.952.360 |
| 1.02.02.1.0 1.03 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | n/a | 2.659.700.000 | 2 unit | 175.000.000.000 | 1 unit | 10.450.000.000 | 1 unit | 244.890.144.052 | 1 unit | 144.277.354.532 | 1 unit | 574.617.498.584 |
| 1.02.02.1.0 1.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | n/a | 486.100.000 | 11 unit | 5.386.800.000 | 15 unit | 256.000.000 | 892 unit | 15.877.397.356 | 491 unit | 62.744.899.976 | 491 unit | 84.265.097.332 |
| 1.02.02.1.0 1.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | n/a | 0 | 29 | 4.280.305.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.280.305.700 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1.02.02.1.0 1.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | n/a | 0 | 1 unit | 1.104.930.000 | 0 | 0 | 1 unit | 250.000.000 | 0 | 0 | 2 unit | 1.354.930.000 |
| 1.02.02.1.0 1.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara | n/a | 4.116.061.600 | 16 unit | 4.902.764.000 | 15 unit | 3.049.700.000 | 8 unit | 3.046.000.000 | 9 unit | 3.924.000.000 | 9 unit | 14.922.464.000 |
| 1.02.02.1.0 1.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | n/a | 194.054.000 | 6 dokumen | 406.604.500 | 4 dokumen | 234.911.500 | 4 dokumen | 236.169.500 | 4 dokumen | 241.169.500 | 4 dokumen | 1.118.855.000 |
| 1.02.02.1.0 1.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | n/a | 12.601.483.392 | 5 paket | 12.465.000.000 | 5 paket | 15.959.000.000 | 5 paket | 17.388.712.500 | 5 paket | 19.372.019.375 | 5 paket | 65.184.731.875 |
| 1.02.02.1.0 2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | 507 orang | 137.668.811.510 | 537 orang | 95.087.693.500 | 552 orang | 91.956.962.700 | 567 orang | 100.158.527.700 | 582 orang | 83.396.889.217 | 582 orang | 370.600.073.117 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Indeks Keluarga Sehat | n/a | | 39 dokumen | | 39 dokumen | | 39 dokumen | | 39 dokumen | | 39 dokumen | |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|---|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan atau Masyarakat dan Operasional Rumah Sakit | n/a | | 36 doku men | | 29 doku men | | 34 doku men | | 35 doku men | | 35 doku men | |
| 1.02.02.1.0 2.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | n/a | 53.846.386.000 | 130 orang | 1.038.605.000 | 145 orang | 1.058.305.000 | 160 orang | 1.068.425.000 | 175 orang | 1.078.545.000 | 175 orang | 4.243.880.000 |
| 1.02.02.1.0 2.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | n/a | 1.692.794.000 | 407 orang | 24.127.845.500 | 407 orang | 19.122.309.050 | 407 orang | 15.274.418.955 | 407 orang | 12.325.961.851 | 407 orang | 70.850.535.356 |
| 1.02.02.1.0 2.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | n/a | 450.228.000 | 6 doku men | 484.050.000 | 6 doku men | 523.100.000 | 6 doku men | 544.410.000 | 6 doku men | 566.851.000 | 6 doku men | 2.118.411.000 |
| 1.02.02.1.0 2.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | n/a | 207.845.000 | 5 doku men | 228.630.000 | 5 doku men | 300.000.000 | 5 doku men | 310.000.000 | 5 doku men | 320.000.000 | 5 doku men | 1.158.630.000 |
| 1.02.02.1.0 2.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | n/a | 22.567.000 | 3 doku men | 24.824.000 | 3 doku men | 30.000.000 | 3 doku men | 35.000.000 | 3 doku men | 40.000.000 | 3 doku men | 129.824.000 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---------------------|--|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1.02.02.1.0 2.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | n/a | 3.580.451.000 | 8 doku men | 3.625.060.000 | 8 doku men | 3.650.000.000 | 8 doku men | 3.700.000.000 | 8 doku men | 3.725.000.000 | 8 doku men | 14.700.060.000 |
| 1.02.02.1.0 2.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | n/a | 67.390.000 | 2 doku men | 106.850.000 | 2 doku men | 138.905.000 | 2 doku men | 180.576.500 | 2 doku men | 234.749.450 | 8 doku men | 661.080.950 |
| 1.02.02.1.0 2.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | n/a | 67.985.000 | 4 doku men | 117.290.000 | 4 doku men | 152.477.000 | 4 doku men | 198.220.100 | 4 doku men | 257.686.130 | 4 doku men | 725.673.230 |
| 1.02.02.1.0 2.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | n/a | 1.048.230.000 | 3 doku men | 1.204.720.000 | 3 doku men | 1.325.192.000 | 3 doku men | 1.457.711.200 | 3 doku men | 1.603.482.320 | 3 doku men | 5.591.105.520 |
| 1.02.02.1.0 2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) | n/a | 1.776.359.500 | 10 doku men | 1.549.710.000 | 11 doku men | 1.704.681.000 | 11 doku men | 1.720.000.000 | 11 doku men | 1.800.000.000 | 11 doku men | 6.774.391.000 |
| 1.02.02.1.0 2.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | n/a | 70.730.013.560 | 8 doku men | 59.882.655.000 | 8 doku men | 57.609.976.500 | 8 doku men | 56.745.582.200 | 8 doku men | 56.046.675.000 | 8 doku men | 230.284.888.700 |
| 1.02.02.1.0 2.17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | n/a | 208.740.000 | 1 doku men | 229.614.000 | 1 doku men | 252.575.400 | 1 doku men | 277.832.940 | 1 doku men | 305.616.234 | 1 doku men | 1.065.638.574 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---------------------|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1.02.02.1.0 2.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | n/a | 325.443.000 | 4 doku men | 487.280.000 | 4 doku men | 557.280.000 | 4 doku men | 561.900.000 | 4 doku men | 566.520.000 | 4 doku men | 2.172.980.000 |
| 1.02.02.1.0 2.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | n/a | 3.350.679.450 | 2 doku men | 1.452.500.000 | 7 doku men | 4.971.101.750 | 12 doku men | 17.513.390.805 | 3 doku men | 3.922.742.232 | 39 doku men | 27.859.734.787 |
| 1.02.02.1.0 2.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | n/a | 293.700.000 | 6 unit | 528.060.000 | 6 unit | 561.060.000 | 6 unit | 571.060.000 | 6 unit | 603.060.000 | 6 unit | 2.263.240.000 |
| 1.02.02.1.0 2.24 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga (2.02.1.02.24) | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | n/a | 8.640.000 | 815.000 keluar ga | 8.640.000 | 825.000 keluar ga | 8.640.000 | 832.000 keluar ga | 8.640.000 | 840.000 keluar ga | 8.640.000 | 840.000 keluar ga | 43.200.000 |
| 1.02.02.1.0 3 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jenis dokumen pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan | 3 | 5.100.000 | 3 | 5.700.000 | 3 | 6.300.000 | 3 | 7.000.000 | 3 | 7.700.000 | 3 | 26.700.000 |
| 1.02.02.1.0 3.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 3 | 5.100.000 | 182 doku men | 5.700.000 | 182 doku men | 6.300.000 | 182 doku men | 7.000.000 | 182 doku men | 7.700.000 | 182 doku men | 26.700.000 |
| 1.02.02.1.0 4 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan rumah sakit yang | n/a | 56.505.000 | 68 unit | 63.530.000 | 73 unit | 67.383.000 | 78 unit | 71.621.000 | 83 unit | 76.283.000 | 83 unit | 278.817.000 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|---|--|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| | Tingkat Daerah Provinsi | melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.1.0 4.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | n/a | 23.000.000 | 30 unit | 25.000.000 | 35 unit | 25.000.000 | 40 unit | 25.000.000 | 45 unit | 25.000.000 | 45 unit | 100.000.000 |
| 1.02.02.1.0 4.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | n/a | 33.505.000 | 38 unit | 38.530.000 | 38 unit | 42.383.000 | 38 unit | 46.621.000 | 38 unit | 51.283.000 | 38 unit | 178.817.000 |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 203.738.500 | 100% | 2.732.621.560 | 100% | 970.873.030 | 100% | 975.873.030 | 100% | 975.873.030 | 100% | 5.655.240.650 |
| 1.02.03.1.0 1 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Sumber daya manusia kesehatan terdistribusi | n/a | 0 | 5 orang | 30.000.000 | 8 orang | 30.000.000 | 12 orang | 30.000.000 | 15 orang | 30.000.000 | 15 orang | 120.000.000 |
| 1.02.03.1.0 1.02 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | n/a | 0 | 5 orang | 30.000.000 | 8 orang | 30.000.000 | 12 orang | 30.000.000 | 15 orang | 30.000.000 | 15 orang | 120.000.000 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|-----------------|---|--|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan | n/a | 203.738.500 | 630 | 2.702.621.560 | 490 | 940.873.030 | 500 | 945.873.030 | 500 | 945.873.030 | 500 | 5.535.240.650 |
| | | Pengembangan pelayanan pelatihan | n/a | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | |
| 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | n/a | 180.988.500 | 630 orang | 2.502.621.560 | 490 orang | 690.873.030 | 500 orang | 690.873.030 | 500 orang | 690.873.030 | 500 orang | 4.575.240.650 |
| 1.02.03.1.02.02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | n/a | 22.750.000 | 1 dokumen | 200.000.000 | 1 dokumen | 250.000.000 | 1 dokumen | 255.000.000 | 1 dokumen | 255.000.000 | 1 dokumen | 960.000.000 |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | 100% | 3.458.000 | 100% | 29.224.000 | 100% | 32.906.000 | 100% | 35.788.000 | 100% | 40.470.000 | 100% | 138.388.000 |
| 1.02.04.1.01 | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | Sarana produksi dan distribusi Alkes, Obat, perbekes dan makanan minuman yang menerapkan standar | n/a | 0 | 34 sarana | 18.577.000 | 37 sarana | 21.859.000 | 40 sarana | 24.141.000 | 43 sarana | 28.423.000 | 43 sarana | 93.000.000 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|-----------------|--|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1.02.04.1.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan | n/a | 0 | 34 sarana | 18.577.000 | 37 sarana | 21.859.000 | 40 sarana | 24.141.000 | 43 sarana | 28.423.000 | 43 sarana | 93.000.000 |
| 1.02.04.1.02 | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | Prosentase sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional yang menerapkan standar | n/a | 3.458.000 | 75% | 10.647.000 | 78% | 11.047.000 | 81% | 11.647.000 | 84% | 12.047.000 | 84% | 45.388.000 |
| | | Sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan perizinan UKOT | n/a | | 35 sarana | | 36 sarana | | 37 sarana | | 38 sarana | | 38 sarana | |
| 1.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | n/a | 3.458.000 | 35 sarana | 10.647.000 | 36 sarana | 11.047.000 | 37 sarana | 11.647.000 | 38 sarana | 12.047.000 | 38 sarana | 45.388.000 |
| 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional | 100% | 532.366.000 | 100% | 612.220.000 | 100% | 673.442.000 | 100% | 740.786.000 | 100% | 814.864.000 | 100% | 2.841.312.000 |
| 2.22.08.5.08 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas dilakukan pengembangan tradisional | 5 kab/kota | 532.366.000 | 5 kab/kota | 612.220.000 | 5 kab/kota | 673.442.000 | 5 kab/kota | 740.786.000 | 5 kab/kota | 814.864.000 | 5 kab/kota | 2.841.312.000 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|-----------------|--|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 2.22.08.5.08.04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional | n/a | 532.366.000 | 12 unit | 612.220.000 | 12 unit | 673.442.000 | 12 unit | 740.786.000 | 12 unit | 814.864.000 | 12 unit | 2.841.312.000 |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88,78 % | 161.149.660.093 | 88,91 | 155.082.799.696 | 89,06 | 212.089.806.877 | 89,21 | 173.371.090.591 | 89,36 | 209.483.310.775 | 89,36 | 750.027.007.939 |
| 0.00.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY | 21 dokumen | 40.931.000 | 21 dokumen | 45.125.000 | 21 dokumen | 49.637.500 | 21 dokumen | 54.601.250 | 21 dokumen | 60.061.375 | 21 dokumen | 209.425.125 |
| 0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21 dokumen | 31.929.000 | 4 dokumen | 35.125.000 | 4 dokumen | 38.637.500 | 4 dokumen | 42.501.250 | 4 dokumen | 46.751.375 | 4 dokumen | 163.015.125 |
| 0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 21 dokumen | 2.281.000 | 2 dokumen | 2.500.000 | 2 dokumen | 2.750.000 | 2 dokumen | 3.025.000 | 2 dokumen | 3.327.500 | 2 dokumen | 11.602.500 |
| 0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 dokumen | 6.721.000 | 15 dokumen | 7.500.000 | 15 dokumen | 8.250.000 | 15 dokumen | 9.075.000 | 15 dokumen | 9.982.500 | 15 dokumen | 34.807.500 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|-----------------|--|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 752 orang/ bln | 90.475.871.528 | 752 orang/ bln | 95.943.333.965 | 768 orang/ bln | 105.537.667.362 | 784 orang/ bln | 116.091.434.098 | 801 orang/ bln | 127.700.577.507 | 801 orang/ bln | 445.273.012.932 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28 doku men | | 28 doku men | | 28 doku men | | 28 doku men | | 28 doku men | | 28 doku men | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 26 lapora n | | 26 lapora n | | 26 lapora n | | 26 lapora n | | 26 lapora n | | 26 lapora n | |
| 0.00.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 lapora n | 90.249.431.528 | 752 orang | 95.698.473.965 | 768 orang | 105.268.321.362 | 784 orang | 115.795.153.498 | 801 orang | 127.374.668.847 | 801 orang | 444.136.617.672 |
| 0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 26 lapora n | 220.440.000 | 28 doku men | 238.860.000 | 28 doku men | 262.746.000 | 28 doku men | 289.020.600 | 28 doku men | 317.922.660 | 28 doku men | 1.108.549.260 |
| 0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 26 lapora n | 1.662.000 | 1 lapora n | 1.662.000 | 1 lapora n | 1.828.200 | 1 lapora n | 2.011.020 | 1 lapora n | 2.212.122 | 1 lapora n | 7.713.342 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---------------------|--|--|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---|-------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.0 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26 laporan | 4.338.000 | 25 laporan | 4.338.000 | 25 laporan | 4.771.800 | 25 laporan | 5.248.980 | 25 laporan | 5.773.878 | 25 laporan | 20.132.658 |
| 0.00.01.1.0 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 74.180.000 | 1 dokumen | 74.180.000 | 1 dokumen | 81.598.000 | 1 dokumen | 89.757.800 | 1 dokumen | 98.733.580 | 1 dokumen | 344.269.380 |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | |
| 0.00.01.1.0 3.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 laporan | 2.000.000 | 1 dokumen | 2.000.000 | 1 dokumen | 2.200.000 | 1 dokumen | 2.420.000 | 1 dokumen | 2.662.000 | 1 dokumen | 9.282.000 |
| 0.00.01.1.0 3.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 laporan | 72.180.000 | 17 laporan | 72.180.000 | 17 laporan | 79.398.000 | 17 laporan | 87.337.800 | 17 laporan | 96.071.580 | 17 laporan | 334.987.380 |
| 0.00.01.1.0 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 orang | 9.315.000 | 30 orang | 9.500.000 | 30 orang | 10.450.000 | 30 orang | 11.495.000 | 30 orang | 12.644.500 | 30 orang | 44.089.500 |
| 0.00.01.1.0 5.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 orang | 9.315.000 | 30 orang | 9.500.000 | 30 Orang | 10.450.000 | 30 Orang | 11.495.000 | 30 Orang | 12.644.500 | 30 Orang | 44.089.500 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|-----------------|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18 Paket | 1.131.463.500 | 20 Paket | 2.124.260.000 | 20 Paket | 2.146.606.000 | 20 Paket | 2.441.266.600 | 20 Paket | 2.597.393.259 | 20 Paket | 9.309.525.859 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 15 unit | | 16 unit | | 14 unit | | 15 unit | | 14 unit | | 14 unit | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | | 5 laporan | |
| 0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 laporan | 35.014.000 | 3 paket | 41.456.500 | 3 paket | 45.602.150 | 3 paket | 50.162.365 | 3 paket | 55.178.601 | 3 paket | 192.399.616 |
| 0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 laporan | 209.358.500 | 3 paket | 217.219.500 | 3 paket | 238.941.450 | 3 paket | 262.835.595 | 3 paket | 289.119.154 | 3 paket | 1.008.115.699 |
| 0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 laporan | 83.566.000 | 6 paket | 1.037.494.000 | 6 paket | 1.141.243.400 | 6 paket | 1.255.367.740 | 6 paket | 1.380.904.514 | 6 paket | 4.815.009.654 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|--|---|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---|----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 laporan | 255.016.000 | 5 paket | 290.056.000 | 5 paket | 319.061.600 | 5 paket | 350.967.760 | 5 paket | 386.064.536 | 5 paket | 1.346.149.896 |
| 0.00.01.1.0 6.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 laporan | 65.619.000 | 3 paket | 72.240.000 | 3 paket | 79.464.000 | 3 paket | 87.410.400 | 3 paket | 96.151.440 | 3 paket | 335.265.840 |
| 0.00.01.1.0 6.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 laporan | 6.996.000 | 2 dokumen | 8.016.000 | 2 dokumen | 8.817.600 | 2 dokumen | 9.699.360 | 2 dokumen | 10.669.296 | 2 dokumen | 37.202.256 |
| 0.00.01.1.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes) | 5 laporan | 377.894.000 | 5 laporan | 284.978.000 | 5 laporan | 313.475.800 | 5 laporan | 344.823.380 | 5 laporan | 379.305.718 | 5 laporan | 1.322.582.898 |
| 0.00.01.1.0 6.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Bapel Jamkessos) | 5 laporan | 98.000.000 | 2 dokumen | 172.800.000 | 0 | 0 | 1 dokumen | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 252.800.000 |
| 0.00.01.1.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan | 106 unit | 25.192.322.000 | 103 unit | 3.179.445.400 | 60 unit | 56.793.766.000 | 32 unit | 5.579.171.100 | 297 unit | 28.963.117.110 | 297 unit | 94.515.499.610 |
| | | Pengadaan mebel | 1 paket | | 2 paket | | 2 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|--|--|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---|----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.0 7.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 paket | 0 | 1 unit | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 |
| 0.00.01.1.0 7.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 1 paket | 0 | 1 unit | 7.100.000 | 0 | 7.810.000 | 0 | 8.591.000 | 0 | 9.450.100 | 0 | 32.951.100 |
| 0.00.01.1.0 7.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 47.446.000 | 2 paket | 854.519.000 | 2 paket | 600.975.000 | 1 paket | 2.900.000.000 | 1 paket | 2.850.000.000 | 1 paket | 7.205.494.000 |
| 0.00.01.1.0 7.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 paket | 569.642.000 | 68 unit | 1.294.702.400 | 31 unit | 1.104.231.000 | 6 unit | 800.554.100 | 6 unit | 3.360.409.510 | 6 unit | 6.559.897.010 |
| 0.00.01.1.0 7.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 paket | 24.166.960.000 | 2 unit | 440.000.000 | 1 unit | 55.000.000.000 | 1 unit | 630.701.000 | 1 unit | 20.000.000.000 | 1 unit | 76.070.701.000 |
| 0.00.01.1.0 7.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 paket | 408.274.000 | 31 unit | 83.124.000 | 29 unit | 80.750.000 | 25 unit | 1.239.325.000 | 25 unit | 2.743.257.500 | 25 unit | 4.146.456.500 |
| 0.00.01.1.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY | 20 laporan | 4.296.326.665 | 20 laporan | 4.832.442.731 | 20 laporan | 5.425.167.915 | 20 laporan | 5.816.027.433 | 20 laporan | 6.024.700.903 | 20 laporan | 22.098.338.982 |
| 0.00.01.1.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 laporan | 2.500.000 | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.150.000 | 2 laporan | 3.315.000 | 2 laporan | 3.496.500 | 2 laporan | 12.961.500 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 8 laporan | 1.477.044.200 | 8 laporan | 1.649.127.000 | 8 laporan | 1.890.209.000 | 8 laporan | 2.128.852.340 | 8 laporan | 2.170.088.014 | 8 laporan | 7.838.276.354 |
| 0.00.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bapel Jamkessos) | 10 laporan | 2.816.782.465 | 10 laporan | 3.180.315.731 | 10 laporan | 3.531.808.915 | 10 laporan | 3.683.860.093 | 10 laporan | 3.851.116.389 | 10 laporan | 14.247.101.128 |
| 0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 84 unit | 1.079.250.400 | 84 unit | 1.270.311.000 | 83 unit | 1.380.077.100 | 83 unit | 1.440.352.310 | 83 unit | 1.505.827.541 | 83 unit | 5.596.567.951 |
| 0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 unit | 218.091.000 | 50 unit | 233.150.000 | 50 unit | 233.150.000 | 50 unit | 233.150.000 | 50 unit | 233.150.000 | 50 unit | 932.600.000 |
| 0.00.01.1.09.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 unit | 49.300.000 | 8 unit | 75.800.000 | 8 unit | 84.230.000 | 8 unit | 93.853.000 | 8 unit | 103.738.300 | 8 unit | 357.621.300 |
| 0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 unit | 147.587.400 | 16 unit | 148.604.000 | 16 unit | 160.539.400 | 16 unit | 171.975.840 | 16 unit | 184.428.424 | 16 unit | 665.547.664 |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
|------------------|--|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------|
| | | | Tahun ke-1 (2022) | | Tahun ke-2 (2023) | | Tahun ke-3 (2024) | | Tahun ke-4 (2025) | | Tahun ke-5 (2026) | | | |
| | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| | Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00.01.1.0 9.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 unit | 3.100.000 | 1 unit | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 0.00.01.1.0 9.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 unit | 162.620.000 | 2 unit | 167.757.000 | 2 unit | 212.157.700 | 2 unit | 218.373.470 | 2 unit | 225.210.817 | 2 unit | 823.498.987 |
| 0.00.01.1.0 9.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | 498.552.000 | 7 unit | 640.000.000 | 7 unit | 690.000.000 | 7 unit | 723.000.000 | 7 unit | 759.300.000 | 7 unit | 2.812.300.000 |
| 0.00.01.1.1 0 | Peningkatan Pelayanan BLUD | BLUD yang meningkat pelayanannya | 4 BLUD | 38.850.000.000 | 4 Unit | 47.604.201.600 | 4 Unit | 40.664.837.000 | 4 Unit | 41.846.985.000 | 4 Unit | 42.520.255.000 | 4 Unit | 172.636.278.600 |
| 0.00.01.1.1 0.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 4 BLUD | 38.850.000.000 | 4 Unit | 47.604.201.600 | 4 Unit | 40.664.837.000 | 4 Unit | 41.846.985.000 | 4 Unit | 42.520.255.000 | 4 Unit | 172.636.278.600 |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | |
| 1 | Prevalensi Stunting | 17,3 | 16 | 14 | 13,7 | 13,3 | 13,3 |

BAB VIII PENUTUP

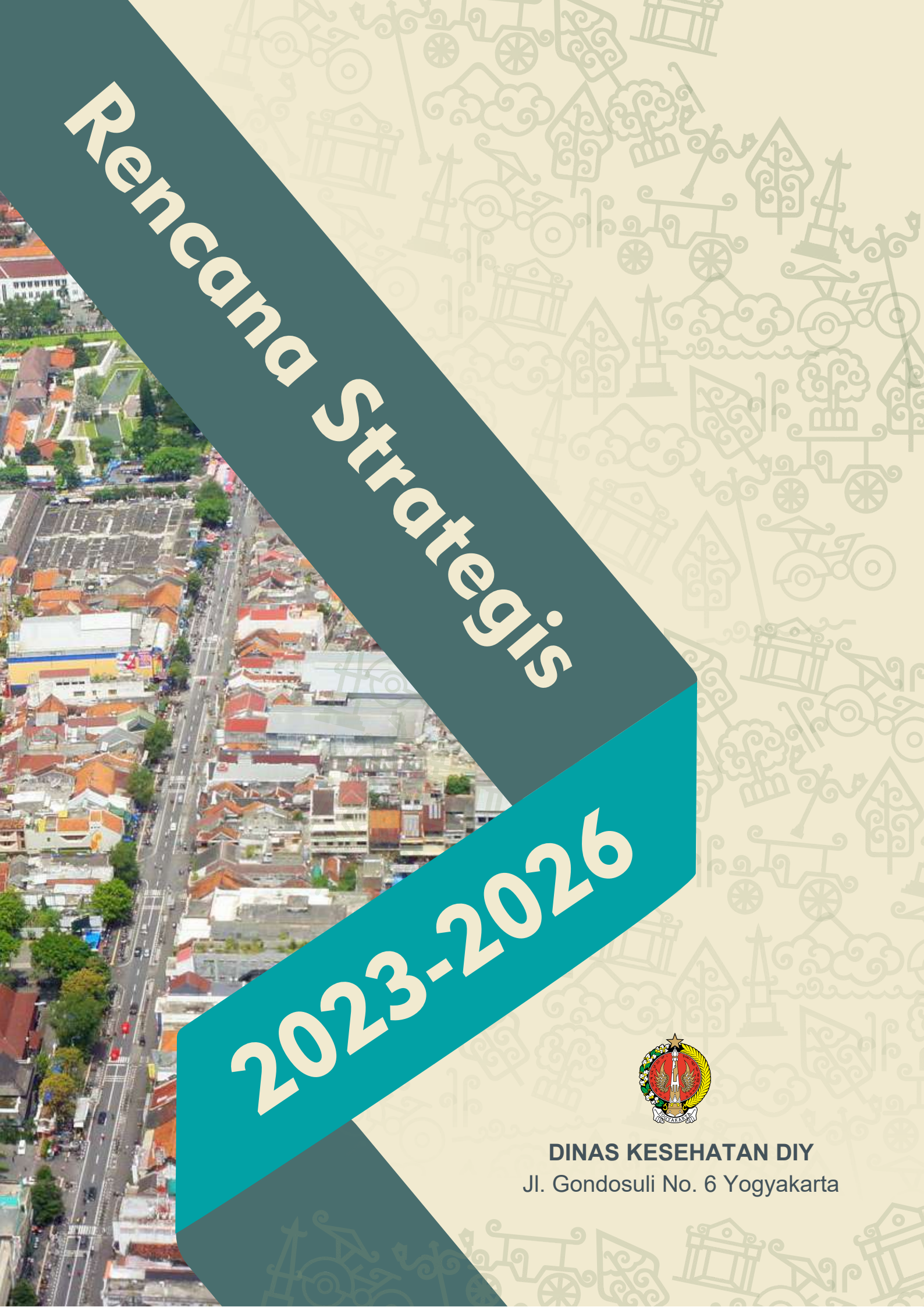
Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY mulai tahun 2023 hingga 2026. Perencanaan pembangunan dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengacu pada RKP Tahun 2023. Hal ini didasarkan pada tahun 2023 merupakan masa transisi antara perodesasi RPMD 2017-2022 dengan RPJMD periode 2022-2027, di mana dalam tahun 2023 masih dalam proses penyusunan.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

KEPALA,

 drg. REMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
 NIP. 19650912 199303 2 006



Rencana Strategis

2023-2026



DINAS KESEHATAN DIY
Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta